

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat 10110 Telepon: 021-4359444 (HUNTING), Faksimile: 021-3843768 Situs: www.kemenkopmk.go.id

Nomor : B.364/TI.03/03/2025 Jakarta, 4 Maret 2025

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Perihal : Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)

Yth. Direktur Diseminasi Statistik

Badan Pusat Statistik

di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Agung Gumilar Triyanto

Instansi/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

Jabatan : Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 RT. 02/ RW. 03, Jakarta Pusat 10110

Email : birosipd@kemenkopmk.go.id

Telepon : (021) 3459444

Tujuan : Pengembangan Dashboard Pemantauan Isu Bidang Pembangunan

Penggunaan Manusia dan Kebudayaan

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP (daftar terlampir).

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi selaku Walidata Kemenko PMK

Ditandatangani secara elektronik

Agung Gumilar Triyanto

Lampiran Surat Nomor: B.364/TI.03/03/2025

DAFTAR PERMOHONAN PENGENAAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PNBP

No	Jenis PNBP	Cakupan Wilayah	Jumlah
1	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 September (MSBP) <i>Fullset</i>	Indonesia	1 Dataset
2	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 Maret (KOR) <i>Fullset</i>	Indonesia	1 Dataset
3	Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022 September (MKP) <i>Fullset</i>	Indonesia	1 Dataset

Nomor: B.364/TI.03/03/2025

ABSTRAKSI PENGGUNAAN DATA

A. Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) kebijakan terkait isu bidang PMK, berkomitmen untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dalam melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan berbasis data (*data-driven policy making*) sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Pratikno selaku Menko PMK. Saat ini isu yang menjadi program strategis Kemenko PMK adalah percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

Untuk mewujudkan data-driven policy making tersebut, Kemenko PMK akan mengembangkan dashboard orkestrasi kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenko PMK membutuhkan dukungan dari Kementerian/Lembaga mitra penyedia data, salah satunya BPS, dalam hal penyediaan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Data Susenas memberikan gambaran berbagai aspek sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesempatan kerja. Dalam proses analisisnya akan didukung oleh Data Potensi Desa yang memberikan gambaran rinci mengenai infrastruktur setiap desa, sehingga memungkinkan penyajian informasi dan perumusan rekomendasi kebijkan lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan tiap wilayah. Dengan menggabungkan kedua data ini berserta dengan data lainnya, alat pemantauan yang dikembangkan akan memberikan hasil yang lebih komprehensif, efektif, dan efisien.

B. Tujuan

Tujuan penggunaan data adalah dalam rangka menindaklanjuti arahan Menko PMK untuk mengembangkan dashboard orkestrasi kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

C. Metode Penelitian

Data Susenas yang dimohonkan akan digabungkan dengan data lainnya untuk divisualisasikan dalam bentuk dashboard pemantauan isu bidang PMK, salah satunya terkait stunting

D. Cakupan Wilayah

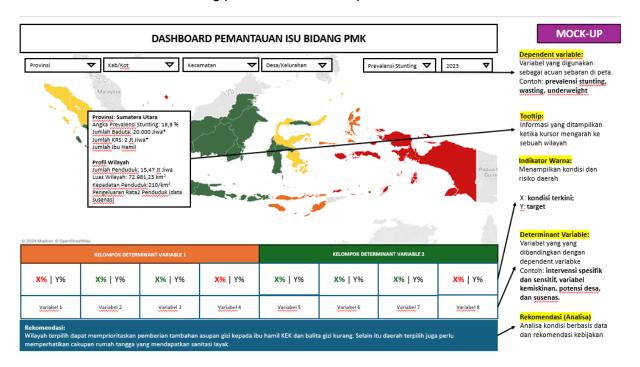
Data Susenas Modul Sosial, Budaya, Pendidikan, Modul Konsumsi dan Pengeluaran, serta Susenas Kor yang dibutuhkan di level Kabupaten/Kota.

E. Jenis Data, Variabel, dan Rentang Waktu

- 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 September (MSBP)
- 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 Maret (KOR)
- 3. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022 September (MKP)

F. Rancangan Hasil

Hasil yang diharapkan dari penggunaan data ini adalah dashboard pemantauan isu bidang PMK. Gambaran hasil tertuang pada desain *mock-up dashboard* berikut.



Namun pemanfaatan data yang dimohonkan tidak sebatas hal tersebut, hasil pemanfaatan juga dapat berupa *Policy Paper / Policy Brief / Policy Memo* yang berkaitan dengan isu bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menjadi keluaran dari Kemenko PMK.